

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

##### 5.1.1. Manajemen *Electronic Government* di Kabupaten Semarang

Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah yang berinisiatif menerapkan *Electronic Government*, kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang di dalam menjalankan fungsi manajemennya terkait penerapan *E-Government*, bahwa inisiatif *E-Government* belum menunjukkan tahap kesempurnaan. Beberapa kelemahan yang dapat diamati terkait manajemen di dalam pelaksanaan *E-Government* di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Pada tahap *planning* atau perencanaan di dalam penerapan *E-government* Kabupaten Semarang, perencanaan berbentuk rencana induk penyelenggaraan *E-Government* yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah. Rencana induk penyelenggaraan *e-Government* disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Di dalam penyusunan rencana induk tersebut pada kenyataan dilapangan masih mengalami kendala dalam tahap awal penetapan aturan penerapan *E-government*, hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan rencana induk yang belum disahkan karena masih menunggu persetujuan.

2. Fungsi *Organizing* atau pengorganisasian, di dalam fungsi kedua ini, Pemerintah Kabupaten Semarang masih belum maksimal pada kenyataannya. Hal ini dapat dilihat dengan hal berikut:
  - a. Kriteria khusus mengenai sumber daya manusia di dalam pemilihan SDM yang akan ditugaskan sebagai pengelola *E-Government* di Kabupaten Semarang adalah mereka yang berlatarbelakang pendidikan IT (SDM TIK), tetapi pada kenyataan dilapangan tidak harus SDM yang berlatarbelaknag IT untuk mengelola *E-Government*, karena yang terpenting adalah mereka yang bisa mengoprasionalkan komputer dan mau belajar untuk kelanjutannya.
  - b. Mengenai ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki bagian Aplikasi dan *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika sangat terbatas sehingga belum mencukupi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan karena masih adanya tumpang tindih pekerjaan sehingga pekerjaan yang dilakukan masih belum maksimal di dalam upaya penerapan *E-Government* di Kabupaten Semarang. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun tetapi tidak dibarengi dengan penerimaan pegawai baru.
3. Fungsi *Actuating*, dalam fungsi ini dilihat dari hasil temuan dilapangan, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang di dalam menjalin komunikasi di Pemerintahan Kabupaten Semarang melalui rapat koordinasi *E-Government* yang diadakan setiap tahunnya.

Kegiatan selain komunikasi di dalam fungsi *actuating* adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah di dalam proses kepemimpinan, pembimbingan dan memberi semangat, inspirasi, dan motivasi kepada bawahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang di dalam memberikan Pembinaan pemerintah daerah melalui:

- a. Koordinasi secara berkala
- b. Pemberian bimbingan dan supervisi
- c. Pengusulan pendidikan dan pelatihan ke PD yang membidangi kepegawaian
- d. Evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.

Menurut temuan lapangan, proses pembinaan dari atasan kepada bawahan di dalam menerapkan *E-Government* masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pemimpin mengenai *E-Government* suatu pemerintahan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel (*good governance*).

4. Fungsi *Controlling* atau pengawasan, dari hasil yang di dapat dilapangan, diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Semarang di dalam kegiatan pengawasan melalui *Monitoring* dan Evaluasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam penerapan *E-Government*.

Pengawasan pemerintah daerah melalui:

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Kegiatan dalam *monitoring* dan evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu mendata Sumber daya manusia yang tersedia, apakah sudah mampu di dalam pengelolaan sistem informasi dan jaringan dengan baik. Pada kenyataan yang ditemukan dilapangan, SDM yang tersedia belum mampu mengelola sistem informasi dengan baik, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika belum menjalankan proses evaluasi dengan maksimal, karena belum mampu meminimalisir hambatan yang ada dilapangan.

Di dalam fungsi pengawasan penerapan *E-Government*, Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Semarang menemukan satu hal yang menjadi penghambat pelaksanaan *E-Government*, hal tersebut adalah proses pembuatan aplikasi yang masih menggunakan jasa pihak ketiga, namun pihak Pengelola *E-Government* masih belum memberikan solusi untuk permasalahan tersebut, sehingga dalam fungsi pengawasan dapat dikatakan belum optimal. Di dalam pembuatan aplikasi yang masih menggunakan jasa pihak ketiga menambah anggaran dan mengurangi efektif dan efisien penerapan *E-Government*.

### **5.1.2. Faktor Pendorong dan Penghambat *Electronic Government* di Kabupaten Semarang**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dibahas dari bab sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa faktor yang mendorong penerapan *E-Government* di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- a. *Value*, dengan diterapkannya *E-Government* di Kabupaten Semarang, banyak manfaat yang dirasakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. Manfaat

yang dirasakan oleh pemerintah adalah dapat mempermudah pekerjaan, mempercepat pekerjaan, efisien, efektif, transparan, dapat memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara cepat sehingga menciptakan keefektifan dan efisiensi dalam hal waktu, dana, dan tenaga. Sedangkan manfaat yang dirasakan masyarakat adalah memberikan dinamika baru dalam hal penyampaian informasi sekarang dan dapat mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya. Keterbukaan informasi publik dapat memudahkan masyarakat di dalam pencarian data-data, melalui *website* Kabupaten Semarang [www.semarangkab.go.id](http://www.semarangkab.go.id)

Sedangkan faktor yang menghambat penerapan *E-Government* di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- a. *Support*, dukungan dari pejabat publik yang belum maksimal dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan *E-Government* di Kabupaten Semarang hal ini dapat dilihat dari dukungan pejabat publik di Kabupaten Semarang yang kurang maksimal, karena kurangnya pengetahuan serta manfaat akan adanya *E-Government* di tiap-tiap OPD, sehingga penerapan *E-Government* belum dapat berjalan maksimal seperti tujuan awal yang diharapkan.
- b. Sumber Daya Manusia, untuk menjalankan pemerintahannya dan menciptakan *good governance* (pemerintahan yang baik), SDM yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Semarang dapat menjadi salah satu faktor penghambat di dalam upaya penerapan *E-Government*, hal ini dapat dilihat dari jumlah SDM yang tersedia belum memadai yang menyebabkan tumpang tindih dalam pekerjaan

yang dikarenakan banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun tetapi tidak dibarengi dengan penerimaan pegawai baru. SDM yang tersedia didalam menjalankan tugasnya masih ada yang tidak sesuai dengan keahliannya.

- c. Sumber Daya Finansial, dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan didalam penerapan *E-Government*. Sumber daya finansial yang tersedia di Kabupaten Semarang di dalam menerapkan *E-Government* dikatakan masih terbatas, sehingga di dalam penerapannya masih kurang maksimal. Anggaran yang terbatas dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pengembangan *E-Government*.
- d. Infrastruktur, secara kuantitas sudah baik, namun secara kualitas infrastruktur penerapan *E-Government* di Kabupaten Semarang masih belum bisa dikatakan baik, karena masih adanya data *center* atau data yang belum terpusat dan belum bisa *pooling* karena berbagai macam kendala.

## **5.2 Saran**

1. Pada tahap perencanaan hendaknya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-literacy*), baik di kalangan pemerintah dan pemerintah daerah otonom maupun di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi (*information society*). Dinas komunikasi dan Informatika segera merencanakan pengelolaan *E-Government* agar bisa menuju proses selanjutnya, yaitu tingkat pematangan yang di dalam *website* terdapat interaksi, sehingga bisa mewujudkan proses pelayanan publik melalui penerapan *E-Government*.

2. Penyediaan SDM yang sesuai kebutuhan, dan harus adanya pelatihan dari ahli yang dikirimkan dari pemerintah pusat untuk staf yang menangani *e-Government*, agar di Kabupaten Semarang memiliki SDM yang handal dalam, dan dibarengi dengan adanya sosialisasi langsung terhadap masyarakat harus lebih di intensifkan agar masyarakat mengetahui tentang program *E-Government* dari Pemerintah.
3. Peningkatan motivasi dari pemimpin kepada kepada seluruh SDM bidang informasi dan komunikasi akan pentingnya penerapan *E-Government* di suatu daerah melalui gerakan-gerakan kecil atau tindakan melalui poster, serta motivasi kepada masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan *E-Government*.
4. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
5. Pemerintah pusat hendaknya memberikan anggaran khusus dari APBD terkait penerapan *E-Government*, sebab untuk menerapkan *e-Government* harus memerlukan biaya yang sangat banyak. Ketersediaan sarana teknologi agar terus diperbaharui lagi sesuai dengan perkembangan teknologi yang sedang berkembang.